

PERAN MEDIA DALAM MEMBINGKAI ETIKA KEPEMIMPINAN: STUDI PERBANDINGAN KOMPAS.COM DAN CNNINDONESIA.COM

Alifiah Mulia Wulandari ^{1*}; Didik Harianto ²

¹ Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia; alif100303@gmail.com¹;

didikhariyanto@umsida.ac.id²

*Correspondence : didikhariyanto@umsida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perspektif Kompas.com dan CNNIndonesia.com menyiarkan tentang gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, berdasarkan etika kepemimpinan. Penelitian ini akan memfokuskan pada pelanggaran kebebasan pers dan gaya komunikasi publik untuk meliput acara Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji. Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman. Model ini mencakup komponen seperti pendefinisian masalah, diagnosis penyebab masalah, penilaian moral, dan saran solusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.com cenderung menyoroti gaya komunikasi yang defensif dan tidak efektif untuk Gubernur, sedangkan CNNIndonesia.com berkonsentrasi pada pelanggaran kebebasan pers dan transparansi; Kompas.com menggunakan pendekatan deskriptif yang lebih netral, sedangkan CNNIndonesia.com mengambil sikap kritis dan eksplisit terhadap tindakan Gubernur. Penemuan ini menunjukkan bahwa media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap etika kepemimpinan dan akuntabilitas pemerintah. Penelitian ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan responsif dalam kepemimpinan publik dan menjaga kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.

Kata kunci

Etika Kepemimpinan, Gubernur Lampung, Kebebasan Pers

ABSTRACT

This study aims to analyze how Kompas.com and CNNIndonesia.com perspectives broadcast about the governor of Lampung, Arinal Djunaidi, based on leadership ethics. This study will focus on the violation of press freedom and public communication style to cover the Socialization and Development of Hajj Service Officers event. This study uses Robert N. Entman's framing model analysis. This model includes components such as defining the problem, diagnosing the cause of the problem, moral judgment, and suggesting solutions. The results of the study show that Kompas.com tends to highlight a defensive and ineffective communication style for the Governor, while CNNIndonesia.com concentrates on violations of press freedom and transparency; Kompas.com uses a more neutral descriptive approach, while CNNIndonesia.com takes a critical and explicit stance on the Governor's actions. These findings suggest that the media plays an important role in shaping public perceptions of leadership ethics and government accountability. This study also emphasizes the importance of clear and responsive communication in public leadership and maintaining press freedom as a pillar of democracy.

Keywords

Freedom of The Perss, Governor of Lampung, Leadership Ethics

Pendahuluan

Framing media secara signifikan memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, terutama dalam konteks demokrasi, di mana media berfungsi sebagai pengontrol dan penyampai informasi. Dalam proses ini, framing tidak hanya mempengaruhi proses suatu isu dan masalah yang terbentuk diberitakan, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat memahaminya. Media dapat menampilkan bagian tertentu dari suatu peristiwa sementara mengabaikan bagian lain yang dapat memengaruhi persepsi, sikap, dan bahkan tindakan publik. Framing media menjadi alat yang sangat kuat sebagai pembentuk narasi sosial dan politik di era modern, terlebih akses informasi sangat cepat dan luas. Sudut pandang berita, narasumber, dan pemilihan diksi adalah beberapa teknik framing yang sering digunakan untuk mengarahkan opini publik. Framing strategis memungkinkan media menciptakan persepsi yang mendukung atau menentang kebijakan atau tindakan pejabat publik. Oleh karena itu, fokus media bukan hanya alat komunikasi tetapi juga alat kekuasaan yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana demokrasi berjalan.

Media massa tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat luas, tetapi juga membantu menjaga pemerintahan demokratis berjalan. Sebaliknya, kebijakan publik, pelayanan publik, dan stabilitas nasional adalah tanggung jawab besar pemerintah. Abraham Lincoln menggambarkan demokrasi sebagai pemerintahan orang-orang, oleh orang-orang, dan untuk orang-orang (Poti, 2011). Dalam kerangka ini, media massa memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan kekuatan mereka dengan bijak; mereka harus bertanggung jawab dan bekerja untuk kepentingan umum. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menjamin kebebasan media massa di Indonesia untuk menyebarkan informasi. Undang-undang ini mengatakan bahwa media massa memiliki hak untuk menjalankan tugas jurnalistiknya tanpa gangguan dari pemerintah atau pihak lain yang berkepentingan. Ini merupakan komponen penting dari perlindungan hukum media massa sebagai pilar keempat demokrasi, yang juga bertanggung jawab untuk memantau pemerintahan dan tindakan agar tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Kebebasan ini juga dihadapkan pada tantangan etika jurnalistik, yang berarti bahwa media harus tetap jujur, akurat, dan mengimbangi berita mereka. Teori framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman sangat relevan untuk diterapkan dalam situasi ini. Entman menjelaskan framing sebagai proses di mana media memilih dan menonjolkan bagian tertentu dari suatu peristiwa sambil mengabaikan bagian lainnya, yang pada gilirannya membentuk persepsi publik tentang masalah tersebut. Analisis framing melihat empat komponen utama: pendefinisian masalah, diagnosis penyebab masalah, penilaian moral, dan saran solusi.

Kebebasan ini memberikan ruang bagi media untuk mengembangkan perspektif yang memengaruhi opini publik, baik dengan mendukung maupun mengkritik pemerintah. Contoh nyata adalah penggunaan framing media dalam pemberitaan kasus Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Terkadang ada ketegangan antara kedua pihak ketika media menyuarakan kritik atau mengungkapkan ketidaksesuaian dengan kebijakan pemerintah. Ketika pemerintah merasa terganggu dengan liputan kritis, mereka kadang-kadang menggunakan peraturan atau tindakan langsung untuk

mengontrol cerita yang sedang berlangsung, yang dapat mengganggu kebebasan media untuk menyampaikan informasi.

Berawal dari kasus yang melibatkan Bima Yudho Saputro, seorang konten kreator yang mengkritik kondisi Lampung melalui platform media sosialnya. Dalam konten berdurasi kurang lebih tiga menit tersebut dengan judul "*Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju*", Bima dengan tegas mengkritik kondisi infrastruktur, pendidikan, birokrasi, dan pertanian di Lampung, tindakannya ini kemudian memicu respons yang beragam dari masyarakat dan Pemerintah Provinsi. Meskipun banyak yang mendukungnya sebagai representasi aspirasi rakyat, respons pemerintah terhadap kritik tersebut cenderung defensif. Menindaklanjuti hal ini, Presiden Joko Widodo bersama beberapa menteri, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri BUMN, dan Menteri Perdagangan meninjau langsung kondisi dan progres pembangunan infrastruktur jalan di Lampung. Presiden mengumumkan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan yang rusak parah jika provinsi tidak mampu melakukannya, "Secepat-cepatnya dimulai [perbaikan jalan] yang rusak. Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, akan diambil alih untuk Kementerian PU [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], utamanya yang jalannya rusak parah," (*dikutip dari Kompas.com, 06 Mei 2023: Presiden Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak di Lampung, Tampan Buat Pemerintah Daerah*) (Robertus, 2023). Langkah tegas ini disambut baik oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Lampung. Namun menuai sorotan negatif bagi Gubernur Arinal Djunaidi. Dalam video liputan yang beredar, Gubernur Arinal Djunaidi terlihat bertepuk tangan dengan senyum lebar saat Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut. Tidak hanya itu Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pun terlihat tidak familiar dengan daerahnya saat ditanya langsung oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini kemudian bukan hanya, memicu kritik yang semakin intensif terhadap kompetensi dan keseriusannya, tetapi juga memicu sorotan mengenai kepemimpinannya secara lebih dalam yang mana menjadi tekanan bagi Gubernur Lampung yang menghadapi tuntutan publik untuk menunjukkan integritas dan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya.

Tekanan ini kemudian menciptakan ketegangan antara media massa dan pemerintah yang dapat terlihat secara jelas dalam isu yang melibatkan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi terhadap tindakannya yang melarang wartawan meliput kegiatannya dan meminta untuk menghapus liputannya. Kejadian ini terjadi pada 15 Mei 2023, saat Gubernur Arinal Djunaidi, menghadiri acara Sosialisasi dan Pembinaan Pelayanan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023 di Hotel Springhill Golden Tulip, Bandar Lampung. Hal itu terjadi saat Gubernur Arinal Djunaidi sedang memberikan sambutan yang kemudian saat menyadari banyak media luar yang meliputnya, Gubernur Arinal menghentikan pidatonya dan menegur salah satu jurnalis televisi yang sedang merekamnya. Padahal, dalam acara tersebut juga hadir Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Lampung, yang memiliki wewenang dan memberikan izin kepada media eksternal untuk menjalankan tugas jurnalistiknya. Dalam sela-sela tegurannya, Gubernur Arinal juga mengaku pusing terkait pemberitaan negatif yang menyangkut dirinya. Sikapnya yang menegur seorang jurnalis yang sedang meliputnya, bahkan mengarahkan agar liputannya dihapus kembali menciptakan sorotan negatif terhadap etika kepemimpinan dan sikap terbuka terhadap kritik publik.

Kepemimpinan dalam sebuah pemerintahan memegang peranan sentral yang krusial. Seorang pemimpin yang efektif bukan hanya mampu merumuskan kebijakan

yang baik, tetapi juga membangun sebuah lingkungan di mana kritik dan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dengan baik. Selain itu, upaya membangun lingkungan tersebut tidak hanya dibutuhkan sebatas sikap kepemimpinan saja, tetapi juga kemampuan untuk mengelola emosi dalam menghadapi tekanan dan tantangan dari berbagai pihak, termasuk media massa.

Media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan sebagai penjaga akuntabilitas publik dan pembentuk opini. Dengan kata lain, media massa memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting dan perlu dibahas oleh masyarakat. Selain itu, media massa juga memiliki peran krusial dalam membentuk kesadaran publik, sesuai dengan materi yang disajikannya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memahami dan menghargai peran kritis media massa yang tidak hanya akan memperkuat integritasnya, tetapi juga memperkuat pondasi demokratisasi suatu negara atau daerah. Selanjutnya, seorang pemimpin harus memiliki sikap terbuka terhadap kritik dari media maupun masyarakat untuk membantu memperbaiki kebijakan publik dan memperkuat legitimasi pemerintah dalam mata masyarakat. Dengan kata lain, lapang dada untuk menerima kritik merupakan kunci untuk menciptakan serta membangun kepercayaan publik yang kuat terhadap institusi pemerintah. Namun dalam praktiknya, tidak mudah bagi pemerintahan maupun media massa jalan dengan selaras, akan selalu ada konfrontasi atau ketegangan antara pemerintah dan media massa yang dapat menghambat proses demokratis dengan membatasi aliran informasi kepada masyarakat. Demikian, penting bagi seorang pemimpin untuk mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk media massa. Hubungan yang sehat antara kepemimpinan dan media massa bukan hanya berdampak pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan, tetapi juga pada dinamika sosial dan politik yang mempengaruhi stabilitas dan perkembangan negara.

Melihat dari latar belakang yang telah dijabarkan, terdapat penelitian terdahulu yang akan menjadi kerangka acuan dalam penelitian ini. Di tulis oleh (Hariyanto & Pritituesdina, 2018) dengan judul "*Analisis Framing Berita Kasus Ahok Dalam Polemik Surat Al-Maidah 51 Pada Kompas.Com Dan Republika.Co.Id.*", penelitian tersebut memiliki hasil bahwa media Kompas.com menganggap bahwa kasus Ahok ini murni atas dasar ketidaksengajaan yang tidak perlu dibesar-besarkan dan dinilai terkesan berpihak kepada Ahok, sedangkan Republika.com menganggap kasus Ahok sebagai kesengajaan yang harus segera ditindaklanjuti dan sangat berpihak kepada umat islam. Penelitian lainnya dilakukan oleh (Manalu & Abidin, 2020) "*Framing Pidato Presiden Joko Widodo Pada Pembukaan Imf 2018 Di Kompas.Com Dan Suara.Com*" dengan hasil Kesimpulan dari realitas media yang dibangun oleh Kompas.com dan Suara.com adalah bahwa kedua media tersebut menunjukkan keberpihakan terhadap Presiden Joko Widodo dibandingkan dengan pihak lawan dalam peliputan pidato pembukaan. Selanjutnya, dengan judul "*Analisis Framing Intimidasi Pemerintah Lampung Terkait Infrastruktur Di Kompas.Com & Detik.Com*", (Damara, Novyanti, Putri, Aisy, & Woelan, 2023) menyimpulkan bahwasanya Kompas.com dalam isu ini lebih fokus pada menonjolkan tanggapan dan mendengarkan aspirasi masyarakat, sedangkan Detik.com lebih menekankan pada sikap keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat terkait video yang diunggah oleh Bima, dengan mencatat dukungan yang luas dari publik terhadap video tersebut. Terakhir, penelitian mengenai "*Analisis Framing Berita Kasus Tuduhan Pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap TikTokers Bima*

Kritik Lampung di Media Online Detik.com dan Kompas.com”, menyimpulkan pemberitaannya Kompas.com terlihat lebih kritis dan tajam dibanding dengan Detik.com yang dalam pemberitaannya lebih menekankan pada pengelolaan persepsi dari berbagai sudut pandang (Iqbal, Arindawati, & Nurkinan, 2023).

Dari uraian yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa media selalu memiliki perspektif yang berbeda tentang masalah yang berbeda, yang seringkali dipengaruhi oleh cara mereka menyampaikan berita. Ini menimbulkan pertanyaan penting: bagaimana kedua situs media terkemuka di Indonesia, Kompas.com dan CNNIndonesia, mengabarkan masalah yang berkaitan dengan Gubernur Arinal Djunaidi serta pelanggaran kebebasan pers? Peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada bagaimana kedua media ini menyoroti ketegangan antara pemerintah dan media massa. Mereka juga akan melihat bagaimana mereka memfokuskan persepsi publik tentang kebebasan pers dan kewajiban pemerintah. Pertanyaan ini sangat penting karena, meskipun ada banyak penelitian yang membahas analisis framing media, sedikit penelitian yang mempelajari masalah kebebasan pers dalam konteks pemerintahan daerah, terutama di Lampung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi publik terhadap tindakan dan profesionalisme Gubernur Lampung dipengaruhi oleh framing yang digunakan oleh Kompas.com dan CNNIndonesia.com. Peneliti memilih kedua media ini karena mereka terkenal membawa berita yang dapat dipercaya kepada masyarakat umum dan sering digunakan sebagai referensi utama dalam pemberitaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana masing-masing media mengolah dan membingkai berita tentang pelanggaran kebebasan pers oleh pejabat pemerintah, serta cara-cara yang berbeda yang mereka gunakan untuk melaporkan masalah ini. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana media dapat mempengaruhi opini publik tentang isu-isu tertentu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik analisis framing. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki bagaimana media memilih dan menyoroti masalah tertentu dalam pemberitaan mereka. Framing, menurut Chong dan Druckman (2007), memungkinkan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, yang memiliki dampak yang berbeda terhadap pemikiran dan prinsip masyarakat. Peneliti berharap dengan metode ini untuk mengetahui bagaimana media memilih untuk menunjukkan ketegangan antara kebebasan pers dan kekuasaan pemerintah. Mereka juga ingin mengetahui bagaimana strategi framing yang digunakan dapat memengaruhi cara masyarakat melihat tindakan Gubernur Arinal Djunaidi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana framing media memengaruhi persepsi publik tentang etika kepemimpinan dan kebebasan pers di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman baru tentang dinamika hubungan antara media dan pemerintah dalam konteks yang lebih luas.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui bagaimana framing mempengaruhi persepsi publik, tetapi juga berkontribusi pada penelitian tentang etika jurnalistik dan profesionalisme pemerintah. Dalam hal ini, penelitian ini inovatif karena memberikan perhatian khusus pada kasus tertentu di Indonesia, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan deskripsi dan penjelasan dalam analisa karakter dari isu terkait pemberitaan etika dan profesionalisme Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, yang pada pemberitannya diketahui tindakannya melarang jurnalis mengambil gambar dalam acara resmi kemudian memicu atensi banyak pihak. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivisme. Menurut Andi Mirza Ronda dalam Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi, Paradigma konstruktivisme merupakan kerangka pengetahuan yang didasarkan pada pandangan bahwa pengetahuan dan kebenaran objektif dibentuk melalui berbagai perspektif. Paradigma ini menekankan bahwa realitas bersifat beragam dan fleksibel, dimana realitas dapat diubah dan dibentuk sesuai dengan tindakan-tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Kalimat yang sederhana untuk memahami konstruktivisme bahwa: “informasi yang beredar di dunia dimasukkan oleh peneliti untuk diolah dan diciptakan, kemudian dikeluarkan sebagai pengetahuan baru” (Ronda, 2018). Konstruktivisme memandang bahwa realitas dalam kehidupan sosial bukanlah sesuatu yang bersifat alami, melainkan merupakan hasil dari proses konstruksi (Suryawati, 2019) dan dalam penelitian ini, paradigma konstruktivisme digunakan untuk menemukan bagaimana konstruksi berita dibangun untuk mbingkai persepsi publik terhadap sikap dan tindakan Gubernur Arinal Djunaidi.

Analisis framing dengan menggunakan model penelitian yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Model framing Robert N. Entman memiliki dua dimensi utama, yaitu seleksi isu dan penonjolan isu. Selain itu, terdapat beberapa elemen tambahan yang digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis konstruksi berita oleh media, yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian) (Entman, 1993)

Media memiliki peran penting dalam mbingkai suatu peristiwa atau masalah melalui beberapa langkah utama. Pertama, *Define Problems*, di mana media memilih dan menekankan bagian tertentu dari suatu isu yang dianggap sebagai masalah utama. Sebagai contoh, dalam kasus Gubernur Lampung, media dapat menyoroti pelanggaran kebebasan pers sebagai isu utama, sekaligus mengabaikan aspek lain yang mungkin relevan. Pemilihan fokus ini memengaruhi cara masyarakat memahami isu tersebut. Kedua, *diagnose cause*, yaitu proses di mana media mengidentifikasi pihak atau elemen yang dianggap bertanggung jawab. Dalam konteks ini, media mungkin mengaitkan ketegangan dengan kebijakan atau tindakan gubernur, sehingga membentuk persepsi publik mengenai akar permasalahan.

Langkah berikutnya adalah *make moral judgement*, di mana media memberikan penilaian moral terhadap suatu tindakan atau peristiwa, misalnya dengan menganggap tindakan gubernur sebagai pelanggaran etika atau prinsip demokrasi. Kritik ini menciptakan narasi yang mengkategorikan tindakan tersebut sebagai salah atau tidak etis. Terakhir, *Suggest Remedies*, yaitu memberikan solusi atau rekomendasi untuk mengatasi masalah. Dalam kasus ini, media dapat menyarankan perubahan kebijakan atau peningkatan transparansi pemerintah guna mencegah pelanggaran kebebasan pers di masa mendatang.

Penelitian ini memilih artikel berita berdasarkan sejumlah kriteria untuk memastikan representasi yang tepat dan relevansi topik yang dibahas. Kata kunci yang digunakan dalam artikel tersebut terkait dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu pelanggaran etika Gubernur Arinal Djunaidi terhadap kebebasan pers dan

profesionalismenya. Kata kunci yang digunakan termasuk "Arinal Djunaidi", "pelanggaran kebebasan pers", dan "Kompas.com" serta "CNNIndonesia". Selain itu, artikel yang dipilih harus dipublikasikan dalam jangka waktu tertentu, seperti dalam kurun waktu satu bulan setelah peristiwa utama terjadi, untuk memastikan bahwa artikel tersebut memberikan informasi yang aktual dan relevan. Untuk memastikan bahwa artikel yang dipilih memiliki dampak pada audiens yang lebih luas, pemilihan juga mempertimbangkan popularitas artikel, yang dapat diukur melalui jumlah pembaca atau interaksi, seperti komentar atau berbagi.

Dilakukan triangulasi data untuk memastikan validitas dan reliabilitas analisis framing. Ini dilakukan dengan mengumpulkan artikel dari dua situs media—Kompas.com dan CNNIndonesia.com—dan membandingkan framing yang digunakan oleh masing-masing. Uji antar-koder juga dilakukan dalam proses ini. Uji antar-koder adalah ketika dua atau lebih ilmuwan melakukan analisis framing pada artikel yang sama secara terpisah, dan hasilnya dibandingkan untuk mengetahui seberapa konsisten interpretasinya. Jika ada pendapat yang berbeda, perundingan dilakukan untuk mencapai konsensus.

Diantara 20 artikel yang dianalisis dalam penelitian ini, 10 di antaranya berasal dari CNNIndonesia.com dan Kompas.com, masing-masing. Artikel-artikel ini dipilih berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas dan membahas berbagai perspektif yang ada dalam pemberitaan tentang pelanggaran kebebasan pers oleh Gubernur Arinal Djunaidi. Dari masing-masing media, peneliti mengambil 2 pemberitaan dari Kompas.com dan 2 pemberitaan dari CNNIndonesia.com dengan rentang waktu 15 Mei 2023 hingga 23 Mei 2023 dan jika ditotal berjumlah 4 berita.

Tabel 1. *Sample* berita Kompas.com dan CNNIndonesia.com

Media	Judul Berita
Kompas.com	"Takut Viral Lagi, Gubernur Lampung Minta Wartawan Hapus Video Liputan"
	"Soal Gaya Komunikasi Gubernur Lampung, Pengamat: Justru Meningkatkan Kecaman Publik"
CNNIndonesia.com	"Gubernur Lampung Minta Wartawan Tak Rekam Kegiatannya: Berbahaya"
	"Dewan Pers dan AJI Kecam Aksi Gubernur Lampung Larang Wartawan Liputan"

Sumber: Olah hasil Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Analisis Framing Media Kompas.com

Berita 1 : Takut Viral Lagi, Gubernur Minta Wartawan Hapus Video Liputan (16 Mei 2023)(Jaya, 2023a)

Pemilihan diksi yang digunakan pada judul berita sering menggunakan kata-kata tertentu untuk memengaruhi pembaca. Ini terbukti dengan penggunaan kata “takut” dalam artikel tentang Gubernur Lampung. Kata-kata ini menunjukkan betapa khawatir Gubernur tentang akibat 284indakan dari video liputan yang tersebar luas. Kata tersebut menarik perhatian pembaca dan menunjukkan ketegangan antara pemerintah dan media, yang dapat dianalisis dengan teori framing. Entman (1993) menyatakan bahwa framing adalah proses memilih dan menonjolkan aspek tertentu dari masalah untuk memengaruhi persepsi 284indak. Judul ini menunjukkan reaksi Gubernur terhadap video 284indakan yang dapat menyebar, yang dapat memengaruhi opini 284indak dan stabilitas politik daerah. Selain itu, judul ini menunjukkan bagaimana media menunjukkan 284indaka di balik 284indakan gubernur, khususnya kekhawatiran tentang dampak liputan tersebut. Tindakan ini sesuai dengan gagasan Entman tentang “mendefinisikan masalah” dan “mengidentifikasi penyebab” dalam konteks. Ini sejalan dengan gagasan Gamson dan Modigliani (1989), yang berpendapat bahwa media secara strategis membentuk pandangan 284indak melalui framing, yang dilakukan melalui pemilihan kata dan penonjolan elemen tertentu. Oleh karena itu, judul ini tidak hanya bertujuan untuk menarik perhatian, tetapi juga untuk mengarahkan pemahaman 284indak tentang 284indakan gubernur dan bagaimana hal itu berdampak pada kebebasan pers dan stabilitas politik di daerah.

Berita 2 : Soal Gaya Komunikasi Gubernur Lampung, Pengamat : Meningkatkan Kecaman Publik (23 Mei 2023) (Jaya, 2023b)

Dalam judul berita mengacu pada cara Gubernur Lampung berkomunikasi dan dampaknya terhadap persepsi publik. Dalam konteks ini, "gaya komunikasi" merujuk pada cara Gubernur Lampung berbicara atau bertindak dalam interaksi publik, termasuk konten dari pernyataan dan sikap yang ditunjukkan. Pengamat yang dikutip dalam judul ini menyoroti bahwa gaya komunikasi tersebut telah meningkatkan rasa kecaman dari publik, menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil oleh Gubernur telah memunculkan reaksi negatif lebih banyak dari masyarakat. Judul ini juga secara implisit menunjukkan seleksi isu dan penonjolan aspek mengenai evaluasi terhadap cara Gubernur Lampung mengelola dan mengkomunikasikan responnya terhadap isu-isu yang menimpa dirinya. Penekanan pada kalimat “meningkatkan kecaman publik” mencerminkan bahwa ada peningkatan dalam kritik atau ketidakpuasan yang dinyatakan oleh masyarakat terhadap Gubernur tersebut, yang mungkin disebabkan oleh gaya komunikasinya yang dipandang kontroversial atau tidak efektif.

Tabel 2. Elemen Framing Berita 1 dan 2 media Kompas.com

Elemen Framing	Berita 1: Takut Viral Lagi, Gubernur Minta Wartawan Hapus Video Liputan	Berita 2: Soal Gaya Komunikasi Gubernur Lampung, Pengamat: Meningkatkan Kecaman Publik

Define Problems	Menyoroti kekhawatiran Gubernur terhadap potensi dampak negatif viralitas liputan media.	Menekankan gaya komunikasi Gubernur yang meningkatkan ketegangan dan kecaman publik.
Diagnose Causes	Gubernur dianggap tidak siap menghadapi media eksternal yang meliput kegiatan resminya.	Gaya komunikasi yang dianggap defensif dikaitkan dengan respons negatif dari masyarakat.
Make Moral Judgment	Menilai tindakan Gubernur meminta wartawan menghapus video sebagai tindakan yang defensif dan tidak profesional.	Menilai gaya komunikasi Gubernur sebagai tidak efektif dan tidak mampu meredakan kritik publik.
Suggest Remedies	Mengingatkan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam berinteraksi dengan media.	Menyarankan penggunaan prinsip komunikasi yang lebih terbuka dan responsif untuk mencegah kritik.

Sumber: Olah Hasil Penelitian

Berdasarkan konsep Robert N. Entman, analisis framing terdiri dari dua komponen penting: *selection dan salience*. Media memilih bagian-bagian tertentu dari realitas untuk diberi perhatian (*selection*), dan kemudian menonjolkan atau memperbesar bagian-bagian tersebut agar lebih bermakna bagi audiens. Dalam artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com tentang Gubernur Arinal Djunaidi, elemen gaya komunikasi yang kaku dan kurang efektif menjadi fokus utama, sementara konsekuensi dari tindakan tersebut, seperti peningkatan ketegangan publik, difokuskan untuk memperkuat pembingkai.

Hal ini tidak hanya terlihat dalam judul kedua berita yang secara gamblang dan jelas menggambarkan bagaimana sosok Gubernur Arina Djunaidi dimata publik, tetapi juga diperkuat pada *make moral judgement* dengan kalimat,

"Sangat tidak efektif. Justru tindakan-tindakan semacam itu hanya akan meningkatkan ketegangan dan memperluas gelombang protes serta kecaman dari publik," kata Feri dalam wawancara tertulis.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Gaye Tuchman, framing dalam pemberitaan tidak hanya mencerminkan realitas tetapi juga membentuk pesan yang disampaikan. Hasil analisis framing ini konsisten. Dalam hal ini, kata-kata seperti "meningkatkan ketegangan" dan "memperluas gelombang protes dan kecaman" menunjukkan bahwa Kompas.com tidak hanya melaporkan peristiwa tetapi juga menanamkan prinsip dan norma moral yang membentuk opini publik. Selain itu, hasil ini sejalan dengan teori framing yang ditemukan oleh Matthes & Kohring (2008), yang menyatakan bahwa media sering membuat framing tiga dimensi: (1) Diagnosis masalah: Menurut Kompas.com, gaya komunikasi gubernur adalah masalah utama, (2) Evaluasi moral: Tindakan tersebut dianggap tidak berguna, bahkan tidak berguna, (3) Solusi: Pentingnya komunikasi yang responsif dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama generasi milenial.

Dengan demikian, pembingkai yang dilakukan Kompas.com ini berfungsi semata-mata tidak hanya untuk membentuk narasi yang menekankan pentingnya komunikasi yang transparan dan efektif dari seorang pejabat publik tetapi juga pentingnya pemerintah pun memahami bagaimana mayoritas pengguna media sosial adalah generasi milenial, di mana gaya komunikasi pejabat publik yang konvensional,

kaku, tertutup, denial, anti kritik, dan tidak responsif sangat tidak disukai (*dikutip dari Kompas.com, 23 Mei 2023 : Soal Gaya Komunikasi Gubernur Lampung, Pengamat : Meningkatkan Kecaman Publik*)

Analisis Framing Media CNNIndonesia.com

Berita 1 : Gubernur Lampung Minta Wartawan Tak Rekam Kegiatannya: Berbahaya (15 Mei 2023) (TIM, 2023)

Dalam penyeleksian isu dan penonjolan aspek masalah pada berita ini, diperlihatkan bahwa konflik antara kebutuhan transparansi publik dan keamanan pribadi menjadi fokus utama. Permintaan Gubernur Lampung kepada wartawan untuk tidak merekam kegiatannya menggambarkan ketegangan antara upaya menjaga privasi individu dalam posisi publik dan tuntutan atas akuntabilitas yang lebih besar dari masyarakat. Dengan menggunakan kata “berbahaya,” judul ini menyoroti potensi risiko yang timbul dari pemaparan publik terhadap aktivitas pemerintah yang tidak direkam, menimbulkan pertanyaan penting mengenai keterbukaan informasi dalam konteks pemerintahan provinsi.

Berita 2 : Dewan Pers dan AJI Kecam Aksi Gubernur Lampung Larang Wartawan Liputan (16 Mei 2023) (MAB, 2023)

Judul berita yang dibuat oleh CNNIndonesia.com kurang lebih sudah dapat mengidentifikasi penyeleksian isu dan penonjolan aspek pada pemberitaannya yang mengacu pada pada respons Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terhadap keputusan Gubernur Lampung yang melarang wartawan meliput kegiatan atau pernyataannya. Diketahui Dewan Pers adalah lembaga independen yang bertanggung jawab mengawasi kegiatan pers di Indonesia, sementara AJI adalah organisasi profesi jurnalis yang memperjuangkan kebebasan pers dan hak-hak jurnalis. Tentunya tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Arinal Djunaidi menarik dan menyinggung perhatian kedua lembaga organisasi tersebut. Dalam konteks ini, jelas dalam judul bahwa pemberitaan ini mengekspresikan kecaman dari Dewan Pers dan AJI terhadap tindakan gubernur yang dianggap sebagai pembatasan dan pelanggaran terhadap kebebasan pers. Kritik ini mencakup pandangan bahwa larangan tersebut dapat menghambat transparansi, akses informasi publik, serta hak jurnalis untuk melaksanakan tugas mereka secara independen dan tanpa hambatan.

Secara lebih luas, judul ini juga mencerminkan dinamika antara pemerintah daerah dan media dalam konteks kebebasan pers dan tanggung jawabnya untuk melaporkan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, judul tersebut tidak hanya menginformasikan tentang peristiwa konkret yang terjadi, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya kebebasan pers dan peran pengawasan yang dimainkan oleh Dewan Pers dan AJI dalam menjaga prinsip-prinsip tersebut.

Tabel 3. Elemen Framing Berita 1 dan 2 media CNNIndonesia.com

Elemen Framing	Berita 1: Gubernur Lampung Minta Wartawan Tak Rekam Kegiatannya: Berbahaya	Berita 2: Dewan Pers dan AJI Kecam Aksi Gubernur Lampung Larang Wartawan Liputan
Define Problems	Menyoroti tindakan Gubernur yang melarang wartawan meliput dengan alasan keamanan, yang dianggap sebagai ancaman kebebasan pers.	Menekankan respons keras Dewan Pers dan AJI terhadap larangan liputan yang dilakukan Gubernur.

Diagnose Causes	Mengaitkan larangan meliput dengan upaya Gubernur mengontrol narasi publik yang dianggap merugikan kebebasan pers.	Pelanggaran terhadap UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dilakukan oleh Gubernur.
Make Moral Judgment	Mengkritik tindakan Gubernur sebagai pelanggaran terhadap transparansi dan prinsip demokrasi.	Menyoroti tindakan ini sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers dan profesionalisme jurnalistik.
Suggest Remedies	Menekankan pentingnya menghormati hak jurnalis untuk meliput kegiatan publik tanpa tekanan.	Penegakan hukum terhadap pelanggaran kebebasan pers dan perlunya regulasi untuk mencegah kejadian serupa.

Sumber: Olah Hasil Penelitian

Berdasarkan konsep analisis framing Robert N. Entman dari dua artikel CNNIndonesia.com terkait pemberitaan etika dan profesionalisme Gubernur Arinal Djunaidi dapat dianalisis bahwa arah pemberitaan CNNIndonesia.com menunjukkan pembingkai yang kuat terhadap pelanggaran etika dan profesionalisme oleh Gubernur Arinal Djunaidi. Analisis framing ini membantu mengembangkan teori framing dalam konteks pemberitaan media di Indonesia, terutama mengenai kebebasan pers dan etika kepemimpinan. Menurut CNNIndonesia.com, framing tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi tetapi juga untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi seperti kejujuran dan tanggung jawab. menggalakkan diskusi publik tentang masalah penting yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat utama, seperti kebebasan pers. membentuk keyakinan umum tentang etika pejabat publik. Dapat diketahui pada *diagnose cause* yang menggaris bawahi kalimat,

"Tindakan meminta penghapusan rekaman jurnalis dapat berdampak negatif pada kebebasan pers dan kredibilitas informasi yang disampaikan..."

Melalui kalimat ini CNNIndonesia.com menekankan pada bagaimana larangan yang diberlakukan oleh Gubernur Arinal Djunaidi dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ini juga memperjelas bahwa tindakan penghapusan rekaman bukan hanya masalah teknis, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan faktual. CNNIndonesia.com secara konsisten menunjukkan dampak negatif larangan rekaman terhadap kebebasan pers dan transparansi pemerintahan ketika menilai tindakan gubernur Arinal Djunaidi. Pemberitaan ini tidak hanya menampilkan peristiwa tetapi juga membentuk pendapat publik yang lebih kritis tentang masalah kebebasan pers dan etika kepemimpinan dengan menggunakan ide-ide dasar teori framing. Ini menunjukkan fungsi media yang kuat sebagai penggerak perubahan sosial dan pengawal demokrasi.

Framing media menurut Hariyanto dan Pritituesdina (2018) dapat menunjukkan keberpihakan atau netralitas dalam menyiarkan masalah sensitif. Republika.com lebih tertarik pada perspektif tertentu, sementara Kompas.com cenderung menggunakan pendekatan yang lebih netral dalam penyelidikan ini. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian: Kompas.com menggunakan pendekatan deskriptif yang lebih netral, dan CNNIndonesia.com menyatakan kritik yang jelas terhadap tindakan Gubernur Lampung. Selain itu, hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Manalu dan Abidin (2020)

yang menemukan bahwa preferensi editorial atau agenda sering memengaruhi framing media. Suara.com, yang meliput pidato Presiden Joko Widodo, tidak melakukan pelanggaran kebebasan pers yang lebih jelas daripada CNNIndonesia.com. Namun, temuan ini bertentangan dengan penelitian Damara, Novyanti, Putri, Aisy, dan Woelan (2023), yang menemukan bahwa Kompas.com lebih memperhatikan tanggapan masyarakat daripada cara pejabat publik berbicara dalam konteks infrastruktur Lampung. Menurut penelitian ini, Kompas.com lebih banyak menekankan gaya komunikasi sebagai bentuk melindungi gubernur Lampung, yang dianggap meningkatkan kecaman publik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa framing media dapat berbeda-beda sesuai dengan masalah dan perspektif editorial. Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menggabungkan analisis gaya framing komunikasi dan kebebasan pers dalam konteks kepemimpinan daerah. Dalam penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Iqbal, Arindawati, dan Nurkinan (2023), framing media lebih banyak membahas aspek teknis pelanggaran hukum seperti UU ITE. Penelitian ini, bagaimanapun, berfokus pada bagaimana framing media dapat memengaruhi persepsi publik terhadap etika kepemimpinan dan tanggung jawab pejabat publik.

Interpretasi Nilai Berita Antara Media Kompas.com dan CNNIndonesia.com

Pada pemberitaan mengenai Etika dan Profesionalisme yang dilakukan oleh Kompas.com dan CNNIndonesia.com pada rentang waktu 15 Mei hingga 23 Mei 2023. Dalam analisis yang telah dilakukan, terdapat persamaan dan perbedaan nilai berita terhadap kedua media yang akan dijelaskan secara rinci dibawah ini.

Persamaan Nilai Berita

Dapat diketahui kedua media memiliki persamaan pada penekanan dampak negatif terhadap dari tindakan Gubernur Arinal Djunaidi terhadap opini publik dan kebasan pers. Dapat diketahui pada analisis di atas, pada *define problem*, Kompas.com dan CNNIndonesia.com memilih isu yang sama untuk kemudian dibingkai menjadi sebuah representasi dari adanya ketegangan antara media massa dan Pemerintah Provinsi Lampung, terlebih Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, diketahui pada pernyataannya,

"Jangan diviralin dulu (sambil menunjuk), hapus semua. Saya pusing, sebentar-sebentar viral, sebentar-sebentar diviralin, nanti dibuat Gubernur marah karena ini itu, jadi netizen. Ini semua saudara-saudara saya kok, jadi kamu awas ya..." kata Arinal

".... Wah berbahaya ini, matiin (kamera). Saya bicara dengan keluarga saya semua kok ini, wajar dong saya sebagai gubernur menasehati supaya gak diulangi," katanya.

Kedua media mengutip pernyataan yang sama untuk menyoroti bagaimana Gubernur Arinal Djunaidi mencoba mengontrol narasi publik dan membatasi kebebasan pers.

Perbandingan Nilai Berita

Menganalisis dua media, tidak mungkin jika tidak terdapat perbedaan didalamnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kedua media, Kompas.com dan CNNIndonesia.com memiliki perbedaan yang cukup signifikan dalam mengkonstruksi sebuah isu. Perbedaan tersebut ada pada fokus berita dan pendekatan dalam penyajian berita.

Pertama, fokus berita Kompas.com Lebih menekankan pada gaya komunikasi Gubernur Arinal Djunaidi yang dinilai memengaruhi dan menentukan persepsi publik terhadapnya,

"Itu semua menentukan positif atau negatifnya penilaian publik terhadap gaya komunikasi pemimpinnya," kata Feri.

Dari kutipan di atas, Kompas.com memberikan perhatian khusus pada respons publik terhadap gaya komunikasi Gubernur. Media Kompas.com mencoba untuk mengukur dan menilai dampak dari cara penyampaian pesan yang digunakan oleh Gubernur dalam interaksi publik dan resmi. Perhatian yang diberikan pada aspek ini mencerminkan pentingnya komunikasi efektif dalam membangun citra dan kepercayaan di mata masyarakat. Kompas.com juga tampaknya berusaha untuk menggarisbawahi bagaimana elemen komunikasi verbal dan non-verbal dari Gubernur bisa mempengaruhi opini publik, baik secara positif maupun negatif, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi persepsi terhadap kinerja dan kebijakan yang diambil oleh Gubernur Arinal Djunaidi. Sedangkan CNNIndonesia.com Lebih fokus pada pelanggaran etika dan kebebasan pers yang dilakukan oleh Gubernur, melalui pernyataan Yadi Hendriana selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers,

"Ya, pasti (mengecam) karena di situ ada intimidasi menghapus gambar. Yang kedua ada juga melarang liputan kegiatan beliau," kata Yadi.

Kutipan tersebut kemudian memberikan CNNIndonesia.com menggarisbawahi bahwa intimidasi dan pembatasan liputan merupakan ancaman langsung terhadap fungsi pers sebagai pilar demokrasi. Dengan mengangkat isu ini, CNNIndonesia.com berusaha untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya mempertahankan kebebasan pers dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Pandangan kritis ini mencerminkan komitmen media untuk membela hak jurnalis dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang bebas dari intervensi atau sensor.

Kedua, dalam hal pendekatan penyajian berita. Pendekatan yang dilakukan oleh Kompas.com lebih deskriptif dan implisit dalam menilai tindakan Gubernur. Pemilihan kata-kata dalam berita lebih halus namun tetap memberikan kesan negatif terhadap tindakan Gubernur. Kompas.com juga berusaha untuk netral dalam menggambarkan realita terhadap isu yang terjadi dengan menyediakan gambaran yang menyeluruh, Sedangkan pendekatan oleh CNNIndonesia.com lebih eksplisit dan kritis dalam menyampaikan kecaman terhadap tindakan Gubernur. CNNIndonesia.com menggunakan kata-kata yang kuat dan tegas dalam menyoroti pelanggaran kebebasan pers dan transparansi. CNNIndonesia.com juga memberikan ruang bagi suara-suara dari organisasi pers dan tokoh masyarakat yang mengecam tindakan tersebut. Dengan mengutip pernyataan dari Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), CNNIndonesia.com menegaskan pentingnya mempertahankan integritas jurnalistik dan kebebasan pers. Media juga secara konsisten menunjukkan posisi yang kritis dan tidak kompromi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dapat membahayakan hak masyarakat dalam mendapatkan hak informasi. Adanya perbedaan ini dapat menunjukkan bagaimana framing kedua media dalam menonjolkan isu yang sama dari

sudut pandang yang berbeda, sehingga menghasilkan persepsi yang berbeda pula di kalangan pembaca.

Tabel 4 Matriks Hasil Analisis Framing

Media	Judul Berita	Elemen Utama	Narasi Utama
Kompas.com	Takut Viral Lagi, Gubernur Minta Wartawan Hapus Video Liputan	Gaya Komunikasi	Gaya komunikasi Gubernur yang defensif meningkatkan kecaman publik.
	Soal Gaya Komunikasi Gubernur Lampung, Pengamat: Meningkatkan Kecaman Publik Gubernur Lampung Minta Wartawan	Respons Publik	Gubernur dianggap tidak mampu meredam kritik masyarakat karena gaya komunikasi yang tidak efektif.
CNNIndonesia.com	Tak Rekam Kegiatannya: Berbahaya	Kebebasan Pers	Larangan liputan oleh Gubernur melanggar hak jurnalistik dan transparansi.
	Dewan Pers dan AJI Kecam Aksi Gubernur Lampung Larang Wartawan Liputan	Etika Jurnalistik	Kritik keras Dewan Pers terhadap tindakan Gubernur sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers.

Sumber: Olah Hasil Penelitian

Menurut Kompas.com, gaya komunikasi Gubernur Lampung dianggap defensif dan tidak efektif untuk menanggapi kritik. Dalam berita "Takut Viral Lagi", komponen "definisi masalah" menunjukkan kekhawatiran Gubernur tentang dampak viralitas media. "Diagnose penyebab" mengaitkan tindakan ini dengan ketidaksiapan Gubernur untuk menghadapi perhatian media. Dalam berita "Soal Gaya Komunikasi", "membuat keputusan moral" mengkritik gaya komunikasi Gubernur sebagai tidak efektif, sementara "merekomendasikan solusi" menekankan bahwa komunikasi yang lebih jelas dan responsif diperlukan untuk memperbaiki citra publik.

Kompas.com adalah unit bisnis dari PT. Kompas Cyber Media (KCM) yang menjadi salah satu pelopor media daring di Indonesia sejak internet pertama kali hadir pada 14 September 1995. Berawal, dengan nama Kompas Online yang dapat diakses melalui Kompas.co.id, situs ini hanya menampilkan salinan berita dari edisi cetak yang terbit pada hari yang sama. Menyadari potensi besar di dunia digital, PT. Kompas Cyber Media (KCM) terus berinovasi dan bertransformasi, sehingga masyarakat tidak hanya menerima salinan berita dari harian Kompas, tetapi juga mendapatkan perkembangan berita terbaru sepanjang hari, menjadikan Kompas.com sebagai rujukan jurnalisme berkualitas di tengah maraknya informasi yang tidak jelas kebenarannya.

Memiliki tagline "*Jernih Melihat Dunia*", Kompas.com bertujuan ingin menjadi media yang selalu menyajikan informasi dalam perspektif yang obyektif, utuh, independen, tidak bias (SYAQINAH, 2019) yang merujuk dalam pengambilan berbagai perspektif dalam menjelaskan duduknya perkara sebuah persoalan. Dengan menyajikan informasi yang mendalam dan berimbang mengenai peristiwa-peristiwa terkait, Kompas.com menginginkan pembaca untuk memahami bagaimana elemen-elemen seperti komunikasi publik dan respons terhadap kritik dapat mempengaruhi reputasi seorang pejabat publik. Pendekatan ini sejalan dengan komitmen mereka untuk menjaga integritas jurnalistik dan memastikan bahwa pembaca mendapatkan informasi yang akurat dan kontekstual untuk membuat penilaian yang lebih informed tentang isu-isu yang dihadapi.

Namun, CNNIndonesia.com berkonsentrasi pada pelanggaran kebebasan pers yang dilakukan gubernur Lampung. Element "definisikan masalah" dalam berita "Gubernur Lampung Minta Wartawan Tak Rekam Kegiatannya" menunjukkan bahwa larangan liputan merupakan ancaman bagi transparansi. Dalam berita "Dewan Pers dan AJI Kecam Aksi", "membuat keputusan moral" mengkritik larangan ini sebagai pelanggaran demokrasi yang serius, dan "merekomendasikan solusi" menekankan penegakan hukum dan reformasi kebijakan untuk mendukung kebebasan pers.

Pendekatan yang berbanding terbalik, dilakukan oleh CNNIndonesia.com dimana, media ini memiliki pendekatan yang ekplisi terhadap isu-isu yang diberitakan. CNNIndonesia.com memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman bagi media ini. Media ini ingin mengungkapkan fakta secara apadanya, singkat, padat dan jelas, tanpa bertele-tele. Diperkuat juga dengan tagline "*Di Titik Api Peristiwa*", CNNIndonesia memiliki tujuan untuk menghadirkan berita sesuai dengan fakta yang ada dan mengupas peristiwa secara tajam dari berbagai sisi. Pemilihan narasumber dari Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan bahwa CNNIndonesia.com secara tegas menyoroti aspek kritis dari tindakan Gubernur Lampung, dengan memberikan ruang bagi suara-suara yang mengedepankan prinsip-prinsip kebebasan pers dan akuntabilitas publik. Pendekatan ini mencerminkan strategi CNNIndonesia.com untuk menyajikan berita yang langsung kepada inti masalah, dengan menonjolkan opini dan pandangan dari pihak-pihak yang memiliki otoritas di bidangnya. Dengan demikian, pembaca CNNIndonesia.com mendapatkan informasi yang tegas dan jelas mengenai posisi moral dan profesional yang diambil oleh pihak-pihak terkait dalam isu tersebut, yang pada akhirnya memberikan panduan yang kuat bagi pembaca dalam memahami dan menilai situasi yang diberitakan.

Secara keseluruhan, kedua media menampilkan fokus framing yang berbeda. CNNIndonesia.com menekankan pelanggaran hak pers dan prinsip demokrasi, sementara Kompas.com berfokus pada gaya komunikasi dan pengaruh terhadap opini publik.

Kesimpulan

Analisis framing menunjukkan bahwa Kompas.com dan CNNIndonesia.com menggunakan cara yang berbeda untuk menceritakan tentang Gubernur Arinal Djunaidi. Salah satu hasil penting dari analisis framing ini adalah bahwa meskipun kedua media setuju bahwa tindakan gubernur berdampak negatif pada opini publik, mereka memiliki perbedaan besar dalam cara mereka menyampaikan informasi dan membentuk persepsi publik.

Kompas.com berfokus pada gaya komunikasi defensif dan tidak efektif Gubernur Arinal Djunaidi, menggunakan pendekatan deskriptif dan implisit. Media berusaha memberikan gambaran yang netral dan menyeluruh, sehingga pembaca dapat membuat kesimpulan sendiri tentang bagaimana gaya komunikasi ini berdampak pada citra dan reputasi gubernur. Metode ini efektif dalam mendorong akuntabilitas pejabat publik karena memberi pembaca kesempatan untuk berpikir secara mandiri. CNNIndonesia.com, di sisi lain, mengambil pendekatan kritis dan jelas dengan menekankan pelanggaran etika dan ancaman terhadap kebebasan pers. Melalui pemilihan narasumber dari Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang memperkuat kampanye mereka untuk mengancam tindakan gubernur, media ini secara tegas mengkritik tindakan tersebut. Metode ini menekankan betapa pentingnya kebebasan pers sebagai bagian penting dari demokrasi dan betapa pentingnya bagi pejabat publik untuk mengikuti etika jurnalistik.

Analisis ini menemukan bahwa framing media memengaruhi persepsi publik tentang masalah kebebasan pers dan akuntabilitas pejabat publik. Penemuan ini mendukung teori framing Robert N. Entman, yang menyatakan bahwa framing media tidak hanya menekankan bagian tertentu dari realitas, tetapi juga mengarahkan audiens ke interpretasi tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun saran bagi media perlu mengadopsi pendekatan kritis dan deskriptif dalam menyampaikan informasi, memastikan pemberitaan yang adil dan transparan sehingga masyarakat dapat memahami situasi secara utuh. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan literasi komunikasi dan menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Pejabat publik perlu mendapatkan pelatihan tentang etika komunikasi dan keterbukaan informasi guna memperkuat hubungan yang konstruktif dengan media.

Selain itu, untuk memahami dampak pemberitaan terhadap dinamika sosial dan mengeksplorasi peran media sosial dalam membentuk narasi publik di era digital, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan pendekatan multidisipliner. Pendekatan ini dapat mengintegrasikan analisis framing, komunikasi politik, dan sosiologi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara media, masyarakat, dan pemerintah

Referensi

- Amal, I., Hayati, L. S., Kurniawati, N. K., & Gumelar, R. G. (2024). Analisis framing: Berita pasca debat pertama calon presiden 2024 pada situs media online. *Mediakomunikasi*, 8(1), 10411. <https://doi.org/10.35760/mkm.2024.v8i1.10411>
- Chong, D., & Druckman, J. N. (2007). Framing Theory. *Annual Review Of Political Science*. Doi:10.1146/Annurev.Polisci.10.072805.103054
- Damara, D. P., Novyanti, D. A., Putri, N. C., Aisy, N. R., & Woelan, R. R. (2023). Analisis Framing Intimidasi Pemerintah Lampung Terkait Infrastruktur Di Kompas.Com & Detik.Com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 168-179.
- Entman, R. M. (1993). *Framing: Toward Clarification Of A Fractured Paradigm*. *Journal Of Communication; Autumn* (Vol. 43).
- Hajrimin. (2018). Analisis framing media massa: Konstruksi berita politik Harian Amanah tentang Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar jelang Pilgub Sul-Sel 2018: Studi analisis framing Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. *Repository UIN Alauddin Makassar*. <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6884/1/Hajrimin.pdf>

- Hariyanto, D., & Pritituesdina, F. (2018). Analisis Framing Berita Kasus Ahok Dalam Polemik Surat Al-Maidah 51 Pada Kompas Kompas.Com Dan Republika.Com. *Jurnal Ilmu Komunikasi Mediakom*, 74–88.
- Iqbal, M., Arindawati, W. A., & Nurkinan. (2023). Analisis Framing Berita Kasus Tuduhan Pelanggaran Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) Terhadap Tiktokers Bima Kritik Lampung Di Media Online Detik.Com Dan Kompas.Com. *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 16–27.
- Jaya, T. P. (2023a, May 16). Takut Viral Lagi, Gubernur Minta Wartawan Hapus Video Liputan. Retrieved From <https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/05/16/105925078/Takut-Viral-Lagi-Gubernur-Lampung-Minta-Wartawan-Hapus-Video-Liputan?Page=All>
<https://doi.org/10.35335/y5fdf071>
- Jaya, T. P. (2023b, May 23). Soal Gaya Komunikasi Gubernur Lampung, Pengamat : Meningkatkan Kecaman Publik. *Kompas.Com*. Retrieved From <https://Regional.Kompas.Com/Read/2023/05/23/190510378/Soal-Gaya-Komunikasi-Gubernur-Lampung-Pengamat-Justru-Meningkatkan-Kecaman?Page=All>
- Mab. (2023, May 16). Dewan Pers Dan Aji Kecam Aksi Gubernur Lampung Larang Wartawan Liputan. *Cnn Indonesia*. Retrieved From <https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20230516132854-12-950245/Dewan-Pers-Dan-Aji-Kecam-Aksi-Gubernur-Lampung-Larang-Wartawan-Liputan/Amp>
- Manalu, I. Y., & Abidin, S. (2020). Framing Pidato Presiden Joko Widodo Pada Pembukaan Imf 2018 Di Kompas.Com Dan Suara.Com. *Jurnal Purnaa Berazam*, 01(02), 73–86.
- Poti, J. (2011). Demokrasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 17–29.
- Robertus, B. (2023, May 6). Presiden Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan Rusak Di Lampung, Tampan Buat Pemerintah Daerah. Retrieved From <Egional.Kompas.Com/Read/2023/05/06/080100378/Presiden-Jokowi-Ambil-Alih-Perbaikan-Jalan-Rusak-Di-Lampung-Tampan-Buat?Page=All>
- Ronda, A. M. (2018). *Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi*. (R. Diana, Ed.) (1st Ed.). Tangerang: Indigo Media.
- Salzafira, & Wijayanti, Q. N. (2024). Analysis of the framing of news of the 2024 presidential candidate in the period leading to the campaign in the 2024 election on the media Jawapos.com and Kompas.com. *Journal Name, Volume*(Issue), Article ID.
- Suryawati, I. (2019). Strategi Ketahanan Pangan Indonesia Dalam Konstruksi Media (Analisis Framing Pada Berita Tirto.Id). *Jurnal Komunikatif*, 08, 84.
- Syaqinah, D. Al. (2019). *Media Online Dan Ujaran Kebencian (Analisis Isi Berita Kompas.Com Menjelang Pilpres 2019)*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang.
- Tim. (2023, May 15). Gubernur Lampung Minta Wartawan Tak Rekam Kegiatannya: Berbahaya. *Cnnindonesia.Com*. Retrieved From <https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20230515194127-32-949945/Gubernur-Lampung-Minta-Wartawan-Tak-Rekam-Kegiatannya-Berbahaya>
- Zahroudina, D., & Hariyanto, D. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Sekolah Tatap Muka Pada Media Cnn Indonesia Dan Okezone.Com. *Indonesian Journal Of Innovation Studies*, 21.